



Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kelurahan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Taslim Fait¹, Fetni², Mardiana³, Fitri Syawalia⁴, Nadila Insira⁵

^{1,2,3,4,5}, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis Korespondensi:

Taslim Fait

taslimfaitsipmsi@gmail.com

Abstrak:

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola administrasi kelurahan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Polinggona. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi pemerintahan yang tertib, sistematis, dan akuntabel, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan peran mereka dalam proses perencanaan pembangunan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan sosialisasi, pelatihan administrasi dan arsip, digitalisasi administrasi sederhana, dan pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur kelurahan, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, perbaikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta kualitas usulan pembangunan yang lebih relevan dan terarah. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata kunci: *Tata kelola administrasi, partisipasi masyarakat, Musrenbang, good governance*

Pendahuluan

Kelurahan merupakan unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Keberhasilan pembangunan di tingkat kelurahan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk mekanisme pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan/desa hingga nasional. Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagai rujukan konseptual partisipasi) Walaupun berfokus pada desa, prinsip partisipatif dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam undang-undang ini relevan diterapkan dalam konteks kelurahan. (Hasim, A., dkk, 2025)

Tata kelola administrasi kelurahan mencakup pengelolaan dokumen, pencatatan data kependudukan, pelayanan administrasi publik, serta penyusunan laporan pemerintahan secara tertib, sistematis, dan akuntabel. Administrasi yang tidak tertata dengan baik dapat menghambat efektivitas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta berdampak pada lemahnya kualitas perencanaan pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus didukung oleh sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Selain tata kelola administrasi, partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam proses pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

(Musrenbang) merupakan instrumen formal yang dirancang untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif. Dalam tata kelola pemerintahan di Kelurahan Polinggona sangatlah penting dilakukan dalam rangka menunjang partisipasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan. Oleh sebab itu semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam suatu pemerintahan di desa atau kelurahan maka semakin maju dan meningkat kapasitas masyarakat dalam tata kelola pemerintahan apalagi pelayanan. Menurut (Rijal, M., dkk, 2023) mengatakan pelayanan administrasi adalah kumpulan aktivitas atau proses yang dilakukan oleh kelompok atau orang dalam suatu organisasi atau badan untuk mengatur berbagai hal terkait administrasi di sebuah perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi lainnya. Olehnya itu perlu dilakukan penyuluhan atau pelatihan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat terutama dalam peningkatan partisipasinya. Penyuluhan partisipatif merupakan suatu pendekatan penyuluhan yang menekankan keterlibatan para petani dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan, yang mencakup pengumpulan dan analisis informasi, identifikasi masalah, analisis tantangan dan implementasi, serta pemantauan dan penilaian (Hasim et al., 2025).

Warsito (2007:25) mendefenisikan: partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sinaga (2005:61) menyebutkan partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan dengan partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai keseluruhan pemerintah, dengan partisipasi vertikal. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, kampanye dan lain sebagainya, disebut partisipasi dalam proses politik, sedangkan keterlibatan dalam kegiatan seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administratif. Sementara itu keterlibatan masyarakat sebagai suatu kesatuan disebut dengan partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok disebut partisipasi individual. Partisipasi vertikal terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat yang terlibat atau yang mengambil bagian dalam suatu program dengan pihak lain. Dalam hubungan Dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Partisipasi horizontal antara satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Jika masyarakat desa yang bersangkutan tidak berkesempatan berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, proyek tersebut pada hakikatnya bukanlah proyek pembangunan desa.

Selanjutnya Edward (2003:81) menegaskan bahwa dimensi keberhasilan suatu pembangunan partisipasi berarti membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang dengan tidak berarti mengorbankan kepentingan pribadi. Memahami beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi itu timbul, tumbuh dan berkembang sebagai akibat adanya perubahan pembangunan dasar manusia yang menjadikan partisipasi sebagai sentral pembangunan. (Salangka, 2020). Menurut Conyers (1991), partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya sekadar kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tanpa partisipasi yang bermakna, pembangunan cenderung bersifat top-down dan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Kondisi di Kelurahan Polinggona

menunjukkan bahwa aparaturnya masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, sementara masyarakat membutuhkan penguatan pemahaman mengenai hak dan perannya dalam proses Musrenbang. Rendahnya sinergi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat berpotensi menyebabkan perencanaan pembangunan yang kurang optimal dan tidak berkelanjutan. Tujuan utama kegiatan adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparaturnya Kelurahan Polinggona dalam pengelolaan administrasi pemerintahan yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran, hak, dan kewajiban mereka dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang.
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lingkungan Kelurahan Polinggona.
4. Memperkuat sinergi dan komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
5. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan kelurahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kelurahan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang melibatkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kelurahan Polinggona. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Tahapan kegiatan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan tanya jawab atau diskusi tentang Peningkatan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kelurahan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang (Rachman & Tungga, 2025). Tahap persiapan yang dilakukan adalah konsultasi dengan Lurah Polinggona tentang kegiatan Pengabdian yang akan dilaksanakan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah mengkaji kondisi administrasi dan tingkat partisipasi Masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya tata kelola administrasi dan Musrenbang partisipatif. Kemudian melakukan pelatihan tentang Pengelolaan administrasi dan arsip, Standarisasi surat-menyurat, Digitalisasi administrasi sederhana dan melakukan pendampingan secara langsung di Kelurahan Polinggona (Gede, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Musrenbang adalah salah satu media untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat yang merupakan sebagai salah satu bentuk sistem untuk pembangunan (Far, 2022). Pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD (A. Aco Agus et al., 2023). Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang, dimana tujuan penyelenggaraan musrenbang secara umum adalah;

1. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).
2. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana
3. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan
4. Memfasilitasi pertukaran informasi, pengembangan consensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah
5. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengisi isu dan permasalahan prioritas Pembangunan daerah

a. Peningkatan Pemahaman Aparatur Kelurahan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur kelurahan terkait tata kelola administrasi yang tertib dan sistematis. Sebelum kegiatan dilaksanakan, aparatur cenderung menjalankan administrasi secara konvensional tanpa standar yang jelas. Setelah diberikan pelatihan dan pendampingan, aparatur mulai menunjukkan perubahan dalam cara kerja yang lebih terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prosedur administrasi pemerintahan. Perubahan ini tercermin dari kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen secara lebih rapi, melakukan pengarsipan yang terorganisir, serta memahami pentingnya ketertiban administrasi sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Secara kualitatif, aparatur juga menunjukkan sikap yang lebih responsif dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam Musrenbang mengalami peningkatan yang cukup nyata. Sebelum kegiatan, masyarakat cenderung memandang Musrenbang sebagai kegiatan formalitas yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan mereka. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi, terjadi perubahan persepsi bahwa Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi. Partisipasi masyarakat juga mengalami perubahan dari yang semula pasif menjadi lebih aktif. Hal ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam diskusi, keberanian menyampaikan pendapat, serta kesediaan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Secara kualitatif, partisipasi tidak hanya diukur dari kehadiran, tetapi juga dari kualitas kontribusi dalam forum Musrenbang. (Sinaga, 2005) Masyarakat mulai menyadari pentingnya keterlibatan dalam Musrenbang dan berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi

c. Peningkatan Kualitas Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat

Kegiatan pengabdian ini juga mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Sebelumnya, komunikasi cenderung bersifat satu arah dan didominasi oleh aparatur pemerintah. Namun, setelah kegiatan, terjadi perubahan menuju komunikasi dua arah yang lebih dialogis. Masyarakat mulai merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara aparatur kelurahan menjadi lebih terbuka dalam menerima masukan. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Secara kualitatif, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih harmonis dan kolaboratif dalam proses pembangunan (Mahbubi, 2025).

d. Peningkatan Kualitas Usulan Pembangunan

Kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan kualitas usulan pembangunan yang diajukan dalam Musrenbang. Sebelum kegiatan, usulan yang disampaikan cenderung bersifat umum dan kurang berbasis pada kebutuhan prioritas masyarakat. Setelah

dilakukan pendampingan, masyarakat mulai mampu mengidentifikasi kebutuhan yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi lingkungan mereka. Usulan yang diajukan menjadi lebih terarah, realistis, dan mempertimbangkan aspek prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami proses perencanaan pembangunan secara lebih komprehensif.

e. Evaluasi dan Tantangan Pelaksanaan Kegiatan

Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu temuan penting adalah masih adanya persepsi di kalangan masyarakat bahwa Musrenbang merupakan kegiatan seremonial yang cenderung didominasi oleh elit tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi meningkat, kualitas partisipasi substantif masih perlu diperkuat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala, baik di kalangan aparatur maupun masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami bagaimana menentukan prioritas program pembangunan secara tepat. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kualitas perencanaan yang dihasilkan.

Dari sisi partisipasi, ditemukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat (*bottom-up*) terhadap pelaksanaan Musrenbang masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan *top-down*. Namun demikian, ketidakpuasan dari perspektif masyarakat memiliki dampak yang lebih besar terhadap efektivitas Musrenbang, karena berkaitan langsung dengan tingkat keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan prosedural, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan (Purwaningsih, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat agar lebih inklusif dan substantif.

f. Peran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Kegiatan Pengabdian

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Polinggona, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pendukung teknis, tetapi juga menunjukkan partisipasi aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Partisipasi mahasiswa terlihat sejak tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengabdian.

Pada tahap persiapan, mahasiswa terlibat dalam membantu koordinasi awal, observasi lapangan, serta pengumpulan informasi terkait kondisi administrasi kelurahan dan tingkat partisipasi masyarakat. Keterlibatan ini memberikan gambaran awal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga memudahkan penyesuaian materi sosialisasi dan pelatihan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Proses persiapan Mahasiswa

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa melakukan koordinasi, Observasi di Kelurahan Polinggona kepada Masyarakat dan pemerintah Desa untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat. Setelah selesai koordinasi maka dilakukan tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan membantu penyampaian materi secara komunikatif dan mudah dipahami. Mahasiswa juga turut serta dalam proses diskusi dan tanya jawab, sehingga menciptakan suasana yang lebih interaktif antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan tim pelaksana pengabdian. Hal ini dapat dilihat dari:



Gambar 2. Proses Pelaksanaan Pengabdian

Secara keseluruhan, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kontekstual (*experiential learning*) bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Polinggona, dapat disimpulkan bahwa program peningkatan tata kelola administrasi kelurahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Pertama, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Aparatur menunjukkan perubahan dalam penerapan sistem administrasi yang lebih tertib, sistematis, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta transparansi.

Kedua, terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Masyarakat tidak lagi bersifat pasif, tetapi mulai terlibat secara aktif dalam menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Ketiga, kegiatan ini mampu memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Hubungan yang sebelumnya cenderung satu arah berkembang menjadi komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan partisipatif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keempat, kualitas usulan pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang mengalami peningkatan, baik dari segi relevansi maupun prioritas kebutuhan. Usulan yang diajukan menjadi lebih terarah, realistis, dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti persepsi masyarakat yang menganggap Musrenbang sebagai kegiatan seremonial, dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat masih perlu terus diperkuat agar lebih substantif dan inklusif.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan temuan kegiatan, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Aparatur Kelurahan. Pemerintah kelurahan perlu secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan lanjutan, khususnya dalam bidang digitalisasi administrasi, pengelolaan data, dan pelayanan publik berbasis teknologi.
2. Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat. Perlu dilakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam Musrenbang, tidak hanya dalam bentuk kehadiran, tetapi juga partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
3. Penguatan Mekanisme Musrenbang Partisipatif. Pemerintah kelurahan perlu memastikan bahwa pelaksanaan Musrenbang berlangsung secara inklusif, transparan, dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu, sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
4. Pengembangan Sistem Informasi dan Transparansi Publik. Diperlukan pengembangan sistem informasi sederhana yang dapat digunakan untuk mendukung transparansi administrasi dan perencanaan pembangunan, seperti publikasi hasil Musrenbang dan prioritas program secara terbuka kepada masyarakat.
5. Peningkatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.
6. Evaluasi Berkelanjutan terhadap Pelaksanaan Musrenbang. Perlu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Musrenbang untuk mengidentifikasi kendala, meningkatkan kualitas proses partisipasi, serta memastikan bahwa hasil perencanaan benar-benar diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat di Kelurahan Polinggona kabupaten Kolaka.

Referensi

- Aco Agus, A., Ahmad, S., R., M., Ismail, Agustang, A. D. M. P., & Arifin, I. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui musrembang: Optimalisasi tata kelola untuk penguatan kapasitas dan kemandirian lokal. *Paramacitra: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 48–53. <https://doi.org/10.62330/pjpm.v1i1.20>
- Gedeona, A. B. (2014). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(3), 72211.
- Hasim, A., et al. (2025). *Penyuluhan partisipatif dalam pembangunan masyarakat: Pendekatan dan implementasi*. Universitas Hasanuddin Press.

- Hasim, D., Leiwakabessy, D. R., Sahat, A., & Sigalingging, M. (2025). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pemerintahan kampung yang partisipatif di Kampung Samber, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. *6*(2), 1227–1233.
- Mahbubi, M. F. (2025). *Efektivitas tugas kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat* (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan musrenbang daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, *6*(1), 151–164.
- Rachman, S. N., & Tunggtati, M. T. (2025). Pengabdian masyarakat dalam mendorong pelayanan publik kelurahan yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *4*(3), 103–111.
- Rijal, M., et al. (2023). *Pelayanan administrasi publik: Konsep dan praktik di tingkat lokal*. Alfabeta.
- Salangka, W. P. R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, *9*(3), 1–9.
- Sinaga, R. (2005). *Partisipasi masyarakat: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.